



Masyarakat Ingatkan Pemkab Gunakan Aset Sesuai Aturan

Nganjuk, Bhirawa

Terkuaknya praktek ilegal pemanfaatan aset barang milik daerah (BMD) yakni ex rumah sakit daerah Kertosono oleh beberapa gelintir orang sebagai tempat prostitusi terselubung menjadi perhatian sejumlah tokoh masyarakat Nganjuk. Pemkab diminta untuk segera

melakukan pendataan aset dan menggunakannya sesuai aturan.

Pujiono, peneliti di Pendidikan Demokrasi, menyebut sebagaimana hasil pemeriksaan BPK, Pemkab Nganjuk perlu melakukan pemetaan masalah untuk mengetahui hal-hal yang kerap

▶▶ ke halaman 11



Ex terminal lama menjadi pujahito lama terbengkalai

Masyarakat Ingatkan Pemkab Gunakan Aset Sesuai Aturan

● Sambungan hal 1

muncul sehingga lebih dapat ditentukan prioritas penyelesaiannya terkait pemanfaatan aset sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).

“Yyang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, maka permasalahan aset yang ada dapat diidentifikasi”, terang Pujiono mencoba mengurai permasalahan BMD tersebut.

Pujiono juga mengintakan Kementerian Dalam Negeri juga telah mengeluarkan semacam teknis pengelolaan dan pemanfaatan aset. “Belum lama ini kementerian dalam negeri kemudian mengeluarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah dan implementasi pengukuran indeks kinerja pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang masih di sosialisasikan, “ujarnya.

Namun Pujiono menyebut dirinya belum tahu bagaimana dengan Kabupaten Nganjuk sendiri melalui Badan Pengelola Aset Daerah (BPKAD) apakah sudah melakukan sosialisasi Permendagri yang baru tersebut.

Memang pekan lalu dalam Sidak Komisi IV DPRD Nganjuk di bekas RSD Kertosono telah mengungkap penyalahgunaan aset milik daerah

oleh pihak yang mengatasnamakan diri sebagai aktifis UMKM dan anggota LSM setempat sebagai tempat hiburan karaoke hingga menyewakan kamar-kamar bekas Rumkit tersebut dengan sistem sewa jam, harian hingga bulanan.

Penyalahgunaan yang bahkan sempat viral dengan dugaan sebagai tempat prostitusi tersebut ditenggarai sudah beroperasi dalam 2=3 bulan ini. Atas hasil sidak oleh Komisi IV DPRD, akhirnya ditindaklanjuti oleh Kasatpol PP selaku penegak Perda yang menghentikan usaha prostitusi terselubung tersebut pada Jumat (03/01/2025) kemarin.

Sementara pada lain, mantan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Nganjuk, Ir Sukonyono, MT mengungkapkan banyaknya aset BMD Pemkab Nganjuk bernilai milyaran rupiah yang terbengkalai. hal ini karena sejak lepas dari badai Covid 19 di tahun 2022 Pemkab Nganjuk lebih menitikberatkan ke pembangunan infrastruktur yakni jalan dan gedung termasuk gedung BPKAD sendiri yang di bangun di tahun 2022 di kelurahan Werungotok Kecamatan Nganjuk.

“Aset BMD yang terletak di tempat tempat strategis namun sudah puluhan tahun terbengkalai, belum ada penangan dan pemanfaatan, Ungkapnya.

Beberapa diantaranya, sebut Sukonyono seperti ex terminal lama yang berada di pinggir jalan Nasional dan stasiun kereta api yang tepat ada di jantung kota Nganjuk. Di

desa Bunggur terdapat sentra minapolitan di terdapat gudang dan tempat penjemputan padi yang terbengkalai hampir 20 tahun lamanya.

Di Desa Balongebang Kecamatan Gondang terdapat 5- 15 hektar lahan ex kantor Balai Pembenihan Pertanian (BPP) Provinsi Jawa Timur yang sudah dihibahkan ke Pemkab Nganjuk.

“Di desa Banaran Kecamatan Kertosono, terdapat ex bandar transit, tempat menampung dan melatih orang-orang yang akan bertransmigrasi di Sumatra”, beber Ir. Sukonyono, MT mantan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Nganjuk,

Terkait hal ini, Sukonyono menyebut, Pemkab belum bisa memanfaatkan aset dengan baik salah satunya diduga karena kepala daerahnya memilih untuk mengerjakan infrastruktur karena untuk kepentingan politik semata.

“Setelah dua kali kepala daerah tersandung tindak pidana korupsi, di tuding sebagai penyebabnya. Itikad baik kepala daerah untuk benar benar membangun daerah secara adil dan berkelanjutan sayangnya juga belum di temui di sosok wakilnya, terbukti semenjak tahun 2022 hingga 2024 hanya menitik beratkan kepada pembangunan infrastruktur jalan (pelebaran, rekonstruksi) dan jembatan serta bangunan dan terkesan hanya berdasarkan proyek semata mengejar modal untuk tahun politik kemarin”, terang Sukonyono saat di temui di kediamannya pada Selasa (07/01/2025). [ndro.gat]